

BAB IV

GAMBARAN UMUM DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN KEPENDUDUKAN PROVINSI RIAU

4.1 Sejarah Singkat Dinas

Pada awal pemerintahan Republik Indonesia, waktu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia menetapkan jumlah kementerian pada tanggal 19 Agustus 1945, Kementerian yang bertugas mengurus masalah ketenagakerjaan belum ada tugas dan fungsi yang menangani masalah-masalah perburuhan diletakkan pada Kementerian Sosial baru mulai tanggal 3 Juli 1947 ditetapkan adanya kementerian Perburuhan dan Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1947 tanggal 25 juli 19947 ditetapkan tugas pokok Kementerian Perburuhan Kemudian berdasarkan Peraturan Menteri Perburuhan (PMP) Nomor 1 Tahun 1948 tanggal 29 juli 1947 ditetapkan tugas pokok Kementerian Perburuhan yang mencakup tugas urusan-urusan social menjadi Kementerian Perburuhan dan Sosial, pada saat pemerintahan darurat di Sumatera Menteri Perburuhan dan Sosial diberi jabatan rangkap meliputi urusan-urusan pembangunan, Pemuda dan Keamanan.

Pada pemerintahan Republik Indonesia Serikat (RIS) organisasi Kementerian Perburuhan tidak lagi mencakup urusan social dan struktur organisasinya didasarkan pada Peraturan Menteri Perburuhan Nomor 1 Tahun 1950 setelah Republik Indonesia Serikat bubar, struktur organisasi Kementerian Perburuhan disempurnakan lagi dengan Peraturan Kementerian Perburuhan Nomor 1 tahun 1951. Berdasarkan

peraturan tersebut mulai tampak kelengkapan struktur organisasi Kementerian Perburuhan yang mencakup struktur organisasi Kementerian Perburuhan yang mencakup struktur organisasi sampai tingkat daerah dan resort dengan uraian tugas yang jelas. Struktur organisasi ini tidak mengalami perubahan sampai dengan kuartal pertama tahun 1954. Melalui Peraturan Menteri Perburuhan Nomor 70 mulai terjadi perubahan yang kemudian disempurnakan melalui Peraturan Menteri Perburuhan Nomor 77 Peraturan Menteri Perburuhan Nomor : 79 Tahun 1954. Berdasarkan Peraturan tersebut Kementerian Perburuhan tidak mengalami perubahan sampai dengan tahun 1964, kecuali untuk tingkat daerah. Sedangkan struktur organisasinya terdiri dari Direktorat Hubungan dan Pengawasan Perburuhan dan Direktorat Tenaga Kerja.

Sejak awal periode demokrasi terpimpin, terdapat organisasi buruh dan gabungan serikat buruh naik yang berafiliasi dengan partai politik maupun yang bebas, pertentangan-pertentangan mulai muncul dimana-mana, pada saat itu kegiatan kementerian. Perburuhan dipusatkan pada usaha penyelesaian perselisihan perburuhan, sementara itu masalah pengangguran terabaikan, sehingga melalui PMP Nomor : 12 Tahun 1959 dibentuk kantor Panitia Perselisihan Perburuhan Tingkat Pusat (P4P) dan Tingkat Daerah (P4D). Struktur organisasi kementerian perburuhan sejak cabinet kerja 1 sampai dengan cabinet kerja IV (empat) tidak mengalami perubahan.

Struktur organisasi mulai berubag melalui Peraturan Menteri Perburuhan Nomor : 8 Tahun 1964 yaitu dengan ditetapkannya empat jabatan. Pembantu menteri untuk urusan-urusan administrasi, penelitian, perencanaan dan penilaian hubungan

dan pengawasan perburuhan, dan tenaga kerja. Dalam perkembangan selanjutnya, organisasi kementerian perburuhan yang berdasarkan Peraturan tersebut disempurnakan dengan Peraturan Menteri Perburuhan Nomor 13 Tahun 1964 tanggal 27 November 1964, yang pada pokoknya menambah satu jabatan Pembantu Menteri Urusan Khusus. Dalam periode Orde Baru (masa transisi 1966-1969), Kementerian Perburuhan berubah nama menjadi Departemen Tenaga Kerja (Depnaker) berdasarkan Keputusan tersebut jabatan Pembantu Menteri dilingkungan Depnaker dihapuskan dan sebagai penggantinya dibentuk satu jabatan Sekretaris Jenderal. Masa transisi berakhir tahun 1969 yang ditandai dengan dimulainya tahap pembangunan Repelita I, serta merupakan awal pelaksanaan Pembangunan Jangka Panjang Tahap I (PJPT I).

Pada pembentukan Kabinet Pembangunan II, Depnaker diperluas menjadi Departemen Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi, sehingga ruang lingkup tugas dan fungsinya tidak hanya mencakup permasalahan ketenagakerjaan tetapi juga mencakup permasalahan ketransmigrasian dan pengkoperasian. Susunan organisasi dan tata kerja Departemen Tenaga Kerja Transmigrasi dan Koperasi diatur melalui Kepmen Nakertranskop Nomor Kep 1000/Men/1975 yang mengacu kepada KEPRES No 44 Tahun 1974. Dalam Kabinet Pembangunan III, unsure koperasi dipisahkan dan Departemen Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi, sehingga menjadi Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Depnakertrans). Dalam masa bakti Kabinet Pembangunan IV dibentuk Departemen Transmigrasi, sehingga unsur transmigrasi dipisah dari Depnaker Susunan organisasi dan tata kerja Depnaker

ditetapkan dengan Kepmenaker No. Kep 199/Men/1984 sedangkan susunan organisasi dan Tata Kerja Departemen Transmigrasi Nomor : Kep-55A/Men/1983.

Pada masa reformasi Departemen Tenaga Kerja dan Departemen Transmigrasi kemudian bergabung kembali pada tanggal 22 Februari 2001. Usaha penataan organisasi Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi terus dilakukan dengan mengacu kepada Keputusan Presiden RI Nomor 47 Tahun 2002 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja. 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Riau (Lembaga Negara Tahun 199 Nomor 50, tambahan Lembaran Negara Nomor 3829), maka sebahagian wewenang pusat diserahkan pada pemerintah daerah.

Menuju Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Kependudukan Provinsi Riau

Sejalan dengan semangat otonomi, Kanwil Departemen Tenaga Kerja menggabungkan diri dengan Pemerintah. Dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah, maka lahirlah Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan yang merupakan gabungan (merger) beberapa urusan/kewenangan daerah yang sejenis, yaitu urusan tenaga kerja, kependudukan, dan transmigrasi demerger menjadi satu dalam satu wadah instansi yaitu Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan. Hal ini dilakukan dalam rangka efisien dan efektivitas organisasi yang berprinsip kepada miskin struktur dan kaya fungsi. Kemudian Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan melalui Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2003 tentang Pembentukan

Organisasi dan Tata Kerja, dipisah menjadi Dinas Tenaga Kerja dan Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana.

Perkembangan selanjutnya, dengan terbitnya Peraturan Daerah nomor 18 tahun 2005 tanggal 6 Desember 2005 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja, Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan kembali mengalami perubahan struktur dimana untuk melaksanakan tugas dan fungsi ketenagakerjaan, social dan pemberdayaan masyarakat, serta ketransmigrasi, dibentuk perangkat daerah dengan nama Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan. Adapun visi dan misi provinsi Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Riau adalah sebagai berikut :

VISI : “Terwujudnya Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian yang Profesional, Produktif, Mandiri, Sejahtera dan Berdaya Saing Tinggi serta Administrasi Kependudukan yang Tertib”

MISI :

1. Mewujudkan Sumber Daya Insani Riau yang Berdaya Saing Tinggi.
2. Mewujudkan Pembangunan Ketenagakerjaan Melalui Perluasan Lapangan Kerja, Penempatan Tenaga Kerja dan Peningkatan Kesempatan Kerja.
3. Mewujudkan Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja.
4. Mewujudkan Kesejahteraan Pekerja dan Perlindungan Tenaga Kerja dalam Segala Aspek.

5. Mewujudkan Terlaksananya Hubungan Industrial yang Dinamis dan Dialogis.
6. Mewujudkan Peningkatan Jaringan Kemitraan dalam Rangka Pencegahan dan Penyelesaian berbagai Permasalahan Tenaga Kerja.
7. Mewujudkan Pengawasan Norma Ketenagakerjaan, Kesehatan Keselamatan Kerja dalam upaya Penegakan Hukum menuju Terciptanya Iklim Investasi yang Kondusif.
8. Mewujudkan Kualitas SDM Transmigran, Penyebaran Perpindahan Penduduk dan Mengembangkan Masyarakat Transmigrasi serta Masyarakat di sekitar Kawasan Transmigrasi serta Berkelanjutan menuju Desa Maju, Mandiri dan Produktif.
9. Mewujudkan Kualitas Penyelenggaraan Admisnitrasei Kependudukan Menuju Tertib Administrasi Kependudukan.

4.2. Struktur Dinas

Struktur organisasi merupakan suatu kerangka yang menunjukkan sebuah tugas dan kegiatan, hubungan antara fungsi wewenang dan tanggung jawab tiap bagian dan bidang atas pekerjaan yang dibebankan kepada individu atau kelompok yang bersangkutan agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai masing-masing orang tersebut akan mengetahui tugas serta tanggung jawabnya dan kepada siapa mereka harus bertanggung jawab.

Walaupun struktur organisasi pada prinsipnya dapat menggambarkan pola hubungan diantara setiap fungsi dan jabatan yang terdapat didalam organisasi

tersebut, namun lebih dari itu struktur organisasi dapat pula tergambar dengan jelas mengenai tingkat kepemimpinan, serta pimpinan yang memegang jabatan didalam organisasi tersebut. Tujuannya adalah setiap orang yang tergantung didalam organisasi tersebut dapat dengan jelas siapa pimpinannya pada berbagai tingkat jabatan didalam organisasi tersebut.

Untuk memperjelas dan mempertegas struktur organisasi perlu digambarkan dalam bagian organisasi, dengan adanya struktur organisasi akan dapat menunjukkan satuan – satuan organisasinya serta garis-garis wewenang dan tanggung jawab. Lebih lanjut dengan adanya bagian organisasi tersebut dapat menghindari kesalahpahaman dan keraguan akan posisi masing-masing dari suatu organisasi didalam suatu perusahaan. Untuk mengetahui struktur organisasi yang terdapat pada Dinas kertransduk dapat dilihat pada gambar dibawah ini :

Dari struktur pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Riau, maka dapat digambar bahwa struktur organisasi yang dipakai adalah type organisasi garis dan staf.

Adapun fungsi, tugas dan tanggung jawab dari masing – masing bagian dari Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Kependudukan Provinsi Riau tersebut adalah sebagai berikut.

1. Kepala Dinas

Merupakan pimpinan tertinggi dalam struktur organisasi tersebut dan sebagai unsur pelaksana pemerintah daerah dibidang pekerjaan umum dan bertanggung jawab langsung kepada Gubernur kepala daerah. Adapun tugas dan tanggung jawab dari kepala Dinas adalah :

- a. Kepala Dinas bertanggung jawab atas pelaksanaan, pengkoordinasian, dan pengintegrasian seluruh kegiatan unit – unit kerja dibawahnya sehingga diperoleh kinerja yang maksimal dalam mencapai misi dan tujuan dan rencana kerja Disnakertransduk.
- b. Mengawasi secara keseluruhan aktivitas instansi
- c. Melakukan pendelegasian tugas sesuai dengan bagian – bagian yang dibutuhkan dinas
- d. Mengambil keputusan dengan segera dalam kondisi dinas yang memungkinkan
- e. Mengawasi secara keseluruhan aktivitas sehubungan masalah administrasi dan umum serta masalah – masalah kepegawaian.
- f. Melakukan pendelegasian tugas sesuai dengan kebutuhan administrasi dan umum.

- g. Mengambil keputusan tentang hal yang berhubungan dengan administrasi dan kepegawaian. Kepala dinas mempunyai tugas – tugas yang bersifat strategi dan berorientasi baik keluar maupun kedalam, dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas unit – unit kerja agar efisiensi dan efektif.
- h. Kepala dinas berperan dan bertanggung jawab sebagai pemimpin penyelenggara operasi (*Chief operating officer*).

2. Kepala Sub Bagian Bina Program

Mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Menghimpun data dan menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program
- b. Melaksanakan pengelolaan data
- c. Melaksanakan pelaksanaan perencanaan program
- d. Menyiapkan bahan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan perundang-undangan
- e. Menghimpun data dan menyiapkan bahan penyusunan program anggaran
- f. Melaksanakan monitoring dan evaluasi, serta penyusunan laporan
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain dan diberikan oleh sekretari.

3. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat penggandaan naskah-naskaah dinas, kearsipan dan perpustakaan dinas.

- b. Menyelenggarakan urusan rumah tangga dan ke protokol serta tugas dibidang hubungan masyarakat.
- c. Mempersiapkan seluruh rencana kebutuhan kepegawaian
- d. Menyusun standar kompetensi pegawai, tenaga teknis, tenaga fungsional, analisis jabatan, analisis tenaga kerja, budaya kerja, keamanan dan tugas umum kepegawaian lainnya.

4. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan

Mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan pengelolaan keuangan termasuk pembayaran gaji pegawai
- b. Melaksanakan pengadministrasian dan pembukuan keuangan
- c. Menyusun laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan
- d. Melakukan penyusunan kebutuhan perlengkapan, pengadaan dan peralatan kantor dan menyusun laporan pertanggung jawaban atas barang – barang inventaris.

5. Kepala Bidang Pengembangan Pemukiman dan Penempatan Transmigrasi

Mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan penyediaan dan sertifikasi tanah transmigrasi
- b. Melaksanakan penyiapan sarana dan pra sarana transmigrasi
- c. Melaksanakan pengerahan dan penempatan transmigrasi

6. Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kawasan Transmigrasi

Mempunyai tugas :

- a. Kegiatan pembinaan pengembangan social budaya yaitu dibidang kesehatan, kelembagaan social desa dan pelayanan transmigrasi serta dibidang pendidikan, kesenian, pemuda, olahraga dan agama.
- b. Kegiatan pembinaan dan pengembangan ekonomi yaitu dibidang produksi dan pengolahan hasil serta kerjasama dengan pihak swasta serta pengembangan usaha dan swadaya masyarakat.
- c. Kegiatan pembinaan dan pengembangan kawasan transmigrasi yaitu yang berkenaan dengan peningkatan sarana dan pra sarana dikawasan transmigrasi.

7. Kepala Bidang Pendudukan

Mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan pendaftaran penduduk
- b. Melaksanakan perencanaan sipil
- c. Melaksanakan pengelolaan informasi administrasi pendudukan
- d. Melaksanakan perencanaan kependudukan
- e. Melaksanakan pemantauan terhadap perkembangan kependudukan

8. Kepala Seksi Penyediaan Dan Sertifikasi Tanah Transmigrasi

Mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan pekerjaan dan kegiatan pengumpulan data dan informasi penyusunan program penyelenggaraan transmigrasi dan kependudukan

- b. Melaksanakan survey dan pemetaan areal transmigrasi meliputi kegiatan antara lain menyiapkan data dan informasi tentang potensi wilayah yang perlu dikembangkan.
- c. Mengurus percadangan areal dan pelepasan kawasan hutan
- d. Menyiapkan bahan penyusunan perencanaan teknik ruang satuan pemukiman

9. Kepala Seksi Pembinaan Sosial Budaya Transmigrasi

Mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan pekerjaan dan kegiatan pembinaan dan pengembangan dibidang kesehatan, kelembagaan social desan dan pelayanan transmigran
- b. Melakukan koordinasi dengan lintas sector terkait
- c. Memberikan pelayanan dan pembinaan kesehatan
- d. Menyiapkan pembentukan dan pembinaan kelembagaan desa.

10. Kepala Seksi Pendaftaran Dan Pencatatan Sipil

Mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan pendaftaran penduduk
- b. Menyiapkan bahan perumusan fasilitas pendaftaran penduduk
- c. Menyiapkan bahan pengawasan, pengendalian kebijakan dan fasilitas mengenai pendaftaran penduduk
- d. Menyiapkan bahan perumusan fasilitas pencatatan sipil.

11. Kepala Seksi Penyiapan Saran dan Pra Sarana Transmigrasi

Mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan pekerjaan dan kegiatan penyiapan lahan dan prasarana jalan dan jembatan serta saluran irigasi / drainase di areal transmigrasi
- b. Koordinasi dengan lintas sektor terkait.
- c. Bimbingan penyusunan spesifikasi teknis lahan dan pra sarana pemukiman penduduk tempatan dan transmigrasi
- d. Pemantauan dan penyiapan bahan evaluasi pelaksanaan pekerjaan pembukaan lahan pembuatan dan peningkatan jalan serta jembatan

12. Kepala Seksi Pembinaan Ekonomi Transmigrasi

Mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan pembinaan teknis pengembangan usaha ekonomi
- b. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan bidang pertanian, pengolahan hasil serta pemasaran
- c. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan industri rumah tangga
- d. Melaksanakan pengembangan kelembagaan.

13. Kepala Seksi Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Pendudukan

Mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan perumusan dan fasilitas pengembangan infrastruktur
- b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan, fasilitas pengembangan program aplikasi SIAK

- c. Melaksanakan inventarsasi calon warga transmigran kepemilikan lahan yang terkena program transmigrasi
- d. Melaksanakan pendataan / pendaftaran dan seleksi calon transmigran

14. Kepala Seksi Pembinaan Dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi

Mempunyai tugas :

- a. Menginventarisasi sarana dan pra sarana
- b. Menyiapkan rencana peningkatan / rehabilitasi sarana dan pra sarana di kawasan transmigrasi
- c. Melakukan kegiatan evaluasi pengembangan sarana dan pra sarana
- d. Melakukan pengkajian standarisasi sarana dan pra sarana

16. Kepala Seksi Perkembangan Dan Penyerasian Kebijakan Kependudukan

Mempunyai tugas :

- a. Melakukan koordinasi dalam rangka penataan penduduk dan penataan lingkungan
- b. Menyusun bahan informasi tentang penyiapan fasilitas dan rencana teknis penataan pendudukan
- c. Melaksanakan pengkajian dalam rangka pencegahan dan penyelamatan kawasan pemukiman
- d. Penyusunan monitoring dan evaluasi penataan penduduk

4.3. Aktivitas Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Kependudukan provinsi Riau

Sesuai, dengan fungsinya Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Kependudukan Provinsi Riau merupakan lembaga yang memberikan petunjuk, pembinaan, pelaksanaan penyuluhan dan pengawasan serta bimbingan terhadap kegiatan pelatihan dan produktivitas tenaga kerja.

Kegiatan kemitraan yang digagas oleh Dinas Tenaga Kerja dan PNPM Mandiri Perkotaan sebagai bentuk dukungan kebijakan nangkis Kota Pekanbaru, telah melahirkan bentuk kerjasama terutama peningkatan kapasitas masyarakat melalui pelatihan – pelatihan yang telah berjalan dari tahun 2009. Pada tahun 2010 ini telah dilaksanakan kegiatan kemitraan sebanyak dua kali, pada bulan Juni 2010 telah dilaksanakan pula kemitraan dengan LKM Sinar Cahaya Limbungan Kelurahan Limbungan melalui PELATIHAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA (TTG) KEGIATAN PEMBERIAN FASILITASI DAN MENDORONG SISTEM PENDANAAN PELATIHAN BERBASIS MASYARAKAT.

Dalam mendorong dan membentuk masyarakat menjadi mandiri melalui budidaya ikan lele. Pada bulan November dilaksanakan pula kegiatan kemitraan dan yang dibina adalah kegiatan budidaya jamur yang dikembangkan di Kelurahan Kulim melalui KSM semangar baru dan BKM berkah yang sudah berjalan dari tahun 2009 telah merintis dan mengembangkan budidaya jamur sebagai kekuatan ekonomi masyarakat dalam peningkatan hidup.

Melalui kegiatan ini pula dalam rangka peningkatan produksi dan teknologi pengembangan jamur, telah dilaksanakan kegiatan kemitraan Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru dengan SKM Semangat Baru yang di motori salah satu Pembina dan instruktur-nya (Bapak Santoso) melalui PELATIHAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA (TTG) PROGRAM PPKK DANA TUGAS PEMBANTUAN (BUDIDAYA JAMUR) yang dilaksanakan dari mulai tanggal 15-27 November 2010 bertempat di hotel furaya dan Praktek Lapangan di Kelurahan Kulim.

Menurut Bapak Santoso “ *Hal ini menjadi dasar kemauan kami untuk bisa bermitra dengan pihak Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru, mengingat selama ini sulit bekerjasama dengan dinas dan kegiatan ini diharapkan akan terus berlanjut supaya tetap eksis dan berkelanjutan dan salah satunya dengan PNPM Mandiri Perkotaan yang telah mensupport kami dari awal dan kerjasama ini menjadi satu langkah maju kami* “.

Kegiatan pelatihan ini bertujuan untuk mengembangkan kegiatan budidaya jamur yang sudah berjalan dan diarahkan Pengembangan produksi berbasis teknologi, pemasaran dan inovasi budidaya jamur. Dan yang menjadi narasumber pada kegiatan ini dari Dinas Tenaga Kerja Provinsi Riau dan Kota Pekanbaru, Dosen Pertanian Universitas Riau dan Bapak Santoso selaku instruktur praktek lapangan.

Peserta kegiatan pelatihan ini diikuti oleh anggota KSM Bangkit Bersama yang telah dibina oleh PNPM Mandiri Perkotaan dan beberapa peserta yang merupakan warga di Kelurahan Kulim baik ibu rumah tangga maupun yang belum mempunyai pekerjaan. Dirasakan betul nilai manfaat yang diharapkan kedepan menjadai satu

tumpuan usaha dan pendapatan yang dapat merubah nasib, seiring asa yang diinginkan oleh para peserta maupun Dinas Tenaga Kerja yang membina kegiatan ini.

Dalam upaya mensinergikan penyusunan program kegiatan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kependudukan (Dinakertransduk) Provinsi Riau menggelar Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi (Rakornis). Tujuannya, agar mempunyai sinkronisasi harmonis antara provinsi dengan kabupaten. Kepala Dinakertransduk Riau, Akmal JS mengatakan, kegiatan ini akan digelar selama tiga hari yakni 24 dan 26 maret 2010 bertempat di Hotel Aryaduta Pekanbaru yang dihadiri sebanyak 67 orang berasal dari sejumlah instansi. “Pesertanya terbatas sebanyak 67 orang.

Diantaranya 12 Kepala Bappeda kabupaten/kota, 12 Kepala Disnakertransduk, Pejabat Struktural yang membidangi Ketenagakerjaan dan Transmigrasi di 12 kabupaten/kota, Jamsostek dan BP2TKI,” Rakornis akan menghadirkan pemakalah-pemakalah yang dapat memberikan pengetahuan dan penambahan wawasan peserta. Dirjen Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja RI, Kepala Biro Perencanaan Depnakertrans RI, Kepala Bappeda Riau, Ketua Kadin Riau, serta Bupati Bengkalis yang juga memaparkan presentasinya akan keberhasilan dalam Kota Terpadu Mandiri. “Kegiatan ini akan dibuka oleh Gubernur”. Dikatakan, Rakornis ini mengambil tema Meningkatkan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia yang Berkompetensi dan Bermartabat Menuju Masyarakat Produktif. Balai latihan Transmigrasi Provinsi Riau, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas tahun 2009, latih 900 orang

transmigrAN DI Unit Pemukiman Transmigrasi (UOT) di 10 Provinsi di wilayah I Sumatera.

Kepala Balai Latihan Transmigrasi Provinsi Riau, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Ir. Joko Purwono mengatakan bahwa pada tahun 2009 ini akan dilaksanakan pelatihan bagi warga transmigran di Unit Pemukiman Transmigrasi di 8 Provinsi di Wilayah I Sumatera, yang akan di ikuti oleh 900 orang peserta, dipekanbaru Jumat 23 Juli 2009.

Pelaksanaan Pelatihan dan Non Pelatihan Masyarakat Transmigran tersebut mencakup 14 kegiatan, terdiri dari Jejaring kerjasama UPT-P dengan UPT-D se Sumatera di Pekanbaru, Identifikasi PPEBA di Sumsel, Temu Usaha PPEBA di Sumsel, Training Needs Assesment (TNA) di Jambi, Sumsel, Riau, valkidasi Modul di Riau, Jambi, Sumsel, Pelatihan PPEBA di Sumsel, Pelatihan PAS di Sumut, Riau, Pelatihan Alsintan di Jambi, Riau, Pelatihan PPM di Sumbar, Bengkulu, Pelatihan Perawat Sarpas Pemukiman di Riau, Manajemen Pemerintah Desa di Suut, Pelatihan Hail Pengolahan Hail pertanian di Sumsel, Sumber, Riau, Pelatihan Manajemen Skala RT di Lampung, Riau dan Pelatihan Kewirausahaan di Bengkulu dan Kepri. Kata Joko.

Pelaksanaan kegiatan Pelatihan dapat terselenggara atas kerjasama antara Balai latihan Provinsi Riau (Pusat) dengan Unit Pelatihan Transmigrasi Daerah di 8 provinsi di Sumatera antara lain Provinsi Sumut, Riau, Sumbar, Kepri, Jambi, Bengkulu, Sumsel, dan Lampung. Berdasarkan data Balatrans Riau, sampai bulan juli 2009 telah dilaksanakan pelatihan untuk 200 orang warga transmigran dengan 7

kegiatan diselenggarakan di provinsi Sumbar, Riau, Sumsel, Jambi, dan Bengkulu. Balai Latihan Transmigrasi Provinsi Riau, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas dibentuk sesuai dengan Surat Menpan No.134/M.PAN/5/2001, merupakan salah satu UPT-P dari 5 UPT-P yang dibentuk. Kelima UPT-P tersebut adalah Balatrans Pekanbaru (Wilayah Sumatera), Balatrans Yogyakarta (Wilayah Jawa), Balatrans Denpasar (Wilayah Bali, NTB, NTT), Balatrans Banjarmasin (Wilayah Kalimantan) dan Balatrans Makassar (Wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua).

